

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM JAMAAH
HAJI DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI YANG DIKELOLA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN**

INTISARI

Oleh :

Rambo Ade Putra¹, Hariyanto²

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Jamaah Haji Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Yang Dikelola Kementerian Agama Kabupaten Sleman adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi perlindungan Hukum jama'ah haji di kementerian Agama Kabupaten Sleman sebagai pengelola Ibadah Haji Tindakan apa sajakah yang bisa ditempuh oleh Jamaah haji apabila terjadi tindakan Hukum yang merugikan menurut Undang-undang perlindungan konsumen.

Penelitian Yang bersifat yuridis empiris melibatkan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data terkait dari bahan-bahan hukum yang terbagi menjadi tiga kategori yakni; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan juga dilakukan dengan menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi empiris.

¹ Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Sleman sebagai pengelola, penyedia jasa pelayanan Penyelenggaraan ibadah haji mempunyai kewajiban-kewajiban yang diatur pada pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 2008, Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tetapi sebagian kewajiban yang lain belum dilaksanakan. Tindakan yang dapat ditempuh Jamaah haji apabila terjadi tindakan yang merugikan adalah dengan melakukan upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari kementerian agama yang pengaturannya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kata kunci : Jamaah haji, Perlindungan Konsumen

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION OF PILGRIMS IN
HAJJ PILGRIMAGE MAINTAINED BY THE MINISTRY OF
RELIGIOUS SLEMAN REGENCY**

ABSTRACT

By:

Rambo Ade Putra¹, Hariyanto²

The research entitled *Juridical Review of Legal Protection of Pilgrims in Hajj Pilgrimage Maintained by the Ministry of Religious Sleman Regency* is to know how the implementation of legal protection of Hajj pilgrimage in Ministry of Religion Sleman Regency as manager of Hajj; what are the actions that can be taken by the pilgrims if there is a case action that prejudices law according to Consumer Protection Act.

The juridical empirical research involves library research to obtain the data related legal materials which are divided into three categories namely; primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The field

¹ Undergraduate Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

² Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

research is also conducted by using interview method to obtain empirical information.

The finding shows that the Ministry of Religious Sleman Regency as maintained service provider of Implementation of pilgrimage has obligations set forth in Article 10 of Law No. 13 of 2008, Article 7 of Law No. 8 of 1999 in Consumer Protection Act, but some liabilities have not been implemented. The pilgrims action that can be taken if there is an adverse action is to bring the legal actions to demand accountability from the Ministry of Religion regulated in Consumer Protection Act (BFL).

Keywords: *pilgrims, Consumer Protection*